

**Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Kinerja  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin**

No	Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Triwulan IV			Kendala/Hambatan	Rencana Tindak	Unit Kerja Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya akses dan fasilitas masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Meningkatkan perumahan layak huni	Menurunkan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	78,80	80	98,5 %	Terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	Bekerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi melalui kegiatan BPS, Dumisake dan Baznas untuk bersama-sama menurunkan RTLH	Bidang Perumahan
		Meningkatkan Permukiman yang layak	Persentase penanganan kawasan kumuh	22,40	46,99	47,66 %	Permasalahan Status lahan /tanah pada kawasan permukiman kumuh. Kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang masalah perumahan/permukiman	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang perumahan dan permukiman yang layak	Bidang Permukiman
2	Indeks tertib administrasi pertanahan	Meningkatnya tata kelola pertanahan	Meningkatkan fasilitas penyelesaian konflik yang terselesaikan	100	100	100%	Masih terjadi konflik-konflik kepemilikan tanah	Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan melalui mediasi	Bidang Pertanahan

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN MERANGIN



**DEDDI CANDRA, SSTP, M.Si**  
NIR 19791117 199810 1 001

**Program dan Kegiatan  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Merangin Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DEARAH KAB/KOTA</b>			
<b>1.1</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, &amp; EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>			
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	99.99	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	80.85	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	19.80	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100	83.43	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100	49.69	
1.1.6	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar	100	20.34	
<b>1.2</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>			
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	97.68	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	94.62	
1.2.3	Koord. & Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD	100	47.80	
<b>1.3</b>	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>			



1.3.1	Pembinaan, Pengawasan, & Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	100	79.87	
1.3.2	Rekonsiliasi & Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	100	43.14	
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	100	80.09	
<b>1.4</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>			
1.4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	100.00	
<b>1.5</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>			
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	99.26	
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	99.17	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	100	100.00	
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100.00	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	98.50	
<b>1.6</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMDA</b>			
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jajalan	100	97.45	
1.6.2	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	100	99.46	
<b>1.7</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
1.7.1	Penyediaan Surat Menyurat	100	20.23	

1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	99.87	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	99.46	
<b>1.8</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	99.17	
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	97.41	
1.8.3	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin lainnya	100	100.00	
1.8.4	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	99.94	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>			
<b>2.1</b>	<b>PENDATAAN PENYEDIAAN &amp; RAHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROG. KAB/KOTA</b>			
2.1.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Prog Kab/Kota	100	99.83	
<b>2.2</b>	<b>SOSIALISASI &amp; PERSIAPAN PENYEDIAAN &amp; REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KAB/KOTA</b>			
2.2.1	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru & Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	100	95.42	
<b>2.3</b>	<b>PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM &amp;/ATAU RUMAH KHUSUS</b>			
2.3.1	Penatausahaan pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100	94.19	
<b>2.4</b>	<b>PENERTIBAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>			
2.4.1	Koordinasi & Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan & Pengembangan Perumahan	100	99.33	

<b>3</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
<b>3.1</b>	<b>PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (sepuluh) Ha</b>			
3.1.1	Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	100	93.81	
3.1.2	Penyusunan Rencana Pencegahan & Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh	100	99.29	
3.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	100	86.27	
<b>3.2</b>	<b>PENATAAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (Sepuluh) Ha</b>			
3.2.1	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	100	99.92	
3.2.2	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	100	97.88	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>			
<b>4.1</b>	<b>URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERUMAHAN</b>			
4.1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Penunjang Fungsi Hunian	100	97.59	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>			
<b>5.1</b>	<b>PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KAB./KOTA</b>			
5.1.1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	100	93.71	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>			
<b>6.1</b>	<b>INVENTARISISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG</b>			



6.1.1	Pemanfaatan Tanah Kosong	100	98.35	
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>			
<b>7.1</b>	<b>PENGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA SATU DAERAH KAB/KOTA</b>			
7.1.1	Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100	98.42	
	<b>JUMLAH</b>	<b>100</b>	<b>98.45</b>	